



Analisis Penyebab, Konsekuensi, Dan Solusi Potret Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto Pasca Reformasi

Winne Ayunda Gaiska

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: winneayndgsk@gmail.com

Naufal Gama Affandyar

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: gus.steven.mblesek@gmail.com

Muhammad Yasin

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: yasin@untag-sby.ac.id

Korespondensi penulis : winneayndgsk@gmail.com

ABSTRACT. *This study analyzes the causes, consequences and solutions to portrait poverty in post-reform Mojokerto Regency, including: Poverty Line, Number of Poor Population, Percentage of Poor Population, Consequences and Solutions to Post-Reform Poverty. Poverty is a very dynamic problem that depends on the challenges faced. In Indonesia, each government period has its own focus and character in efforts to reduce poverty. Preparing for the analysis requires information to be used in the research process. Information in the form of research published by the Central Bureau of Statistics of Finland (BPS), other information from the BPS of East Java Province, BPS of Mojokerto Regency, using time series data (time series data) at least from the most recent period of 3-5 years, and using djpb data from the Indonesian Ministry of Finance. The results of the study show that the poverty line is known to be directly proportional to the increase in the number of poor people in 2020. This indicates that the increase in the price of food and other staple goods will be far above the average. spending of the poor. The very poor and the poor remained in place, while the near poor became even poorer as their spending could no longer keep up with the rising poverty line. It is hoped that during this reform period, the Mojokerto Regency Government will be able to overcome the impacts and consequences and find solutions or steps to reduce the current poverty problems in Mojokerto Regency.*

Keywords: *poverty line, consequences and solutions to poverty, reform.*

ABSTRAK. Kajian ini menganalisis penyebab, konsekuensi dan solusi potret kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pasca reformasi, antara lain: Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Konsekuensi dan Solusi Kemiskinan Pasca Reformasi. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat dinamis yang bergantung pada tantangan yang dihadapi. Di Indonesia, setiap periode pemerintahan memiliki fokus dan karakter tersendiri dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Mempersiapkan analisis membutuhkan informasi yang akan digunakan dalam proses penelitian. Informasi berupa penelitian yang diterbitkan oleh Badan Pusat

Received Maret 27, 2023; Revised April 23, 2023; Accepted Mei 27, 2023

* Winne Ayunda Gaiska, winneayndgsk@gmail.com

Statistik (BPS), informasi lain dari BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kabupaten Mojokerto, menggunakan data deret waktu (time series data) minimal dari periode yang paling baru 3-5 tahun, dan menggunakan data djpb dari Kementerian Keuangan RI. Hasil kajian menunjukkan bahwa garis kemiskinan diketahui berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga bahan pangan dan barang kebutuhan pokok lainnya akan jauh di atas rata-rata pengeluaran orang miskin. Diharapkan dalam masa reformasi ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengatasi dampak dan akibatnya serta mencari solusi atau langkah-langkah untuk mengurangi permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Mojokerto saat ini.

Kata Kunci : garis kemiskinan, konsekuensi dan solusi kemiskinan, reformasi.

LATAR BELAKANG

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan tidak dapat terpenuhi. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kesulitan dalam pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Kemiskinan bukan hanya kondisi hidup dengan kekurangan uang dan tingkat pendapatan yang rendah, tetapi juga banyak hal lain seperti kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, perlakuan yang tidak adil, risiko kejahatan dan ketidakberdayaan untuk mengambil keputusan tentang gaya hidup seseorang (Suryawati, 2005). Kemiskinan merupakan masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau minimum hidup, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Dalam arti yang lebih luas, kemiskinan bersifat multidimensional, yaitu kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berbeda-beda, yang kemudian dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda pula. Kemiskinan terutama meliputi kemiskinan, rendahnya partisipasi organisasi sosial politik dan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Aspek sekunder meliputi jaringan sosial yang buruk, sumber daya keuangan yang terbatas dan pengetahuan yang terbatas, sedangkan kemiskinan mengacu pada fakta seperti kurangnya air bersih, kekurangan gizi, pendidikan rendah, pengangguran tinggi dan lain-lain. Kemiskinan merupakan masalah utama di Indonesia saat ini dan semakin menarik perhatian dari pemerintah Indonesia. Dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto menempati urutan ke-21 dari 38 wilayah administratif/kabupaten dalam hal persentase penduduk miskin. Kota Batu memiliki proporsi penduduk miskin terendah sebesar 3,89 persen, sedangkan Kabupaten

Sampang memiliki proporsi tertinggi (22,78 persen). Ini dianggap sebagai ketidakmampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan dan non-pangan).

Untuk menyiapkan analisis, reformasi mengacu pada upaya pemerintah dan individu untuk melakukan perubahan pada suatu badan atau lembaga di lingkungan dengan memeriksa fenomena yang terjadi sebelumnya yang tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan anggota melalui tindakan administratif. memiliki sistem atau organisasi yang terorganisir. Reformasi dapat dilaksanakan di semua bidang kehidupan, tidak terkecuali di bidang agama, berdasarkan dinamika kehidupan yang selama ini salah diterapkan, yang memerlukan perbaikan dan pelurusan tujuan melalui visi dan misi yang jelas. Upaya yang telah dilakukan selama tiga dasawarsa untuk mengentaskan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pengembangan pertanian, penyediaan dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan infrastruktur dan penunjang. , konseling untuk mengurangi tindakan kebersihan, dll. Padahal, masalah kemiskinan sudah ada sejak lama. Dahulu, umumnya orang menjadi miskin bukan karena kekurangan pangan, tetapi karena kekurangan fasilitas atau materi. Dengan taraf hidup saat ini, mereka tidak menikmati layanan pendidikan, layanan kesehatan dan kemudahan lain yang tersedia saat ini. Kemiskinan sebagai penyakit sosial-ekonomi tidak hanya mempengaruhi negara-negara berkembang tetapi juga negara-negara industri.

KAJIAN TEORITIS

Kotze (dalam Wisdom, 2004:6) menunjukkan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber daya melalui peluang yang ada. Meskipun terkadang bantuan dari luar digunakan, tidak dapat dijamin bahwa masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap gagal karena tidak ada masyarakat yang dapat bertahan dan berkembang jika terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya. Isolasi ini menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi melarat. Selanjutnya, Supriatna (1997:90) menyatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi yang sepenuhnya membatasi yang tidak terjadi dalam kehendak seseorang. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal

maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Bank Dunia (1990) dalam laporannya di hadapan anggota PBB bertitel "Poverty and Human Development' mengatakan bahwa:

"The case for human developemnt is not only or even primarily an economic one. Less hunger, fewer child death, and better change of primary education are almost universally accepted as important ends in themselves"

(Pembangunan manusia tidak hanya diutamakan pada aspek ekonomi, tapi yang lebih penting ialah mengutamakan aspek pendidikan secara universal bagi kepentingan diri orang miskin guna meningkatkan kehidupan sosial ekonominya).

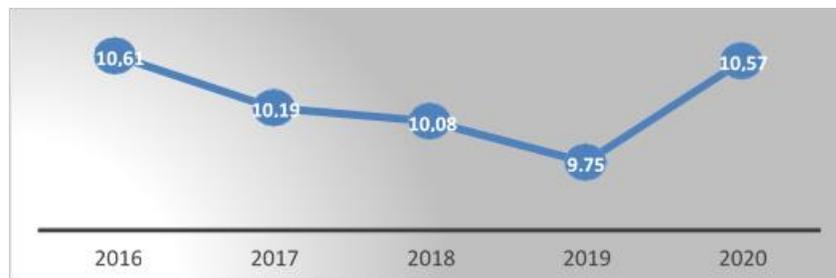
Booth dan Me Cawley (Dalam Moeljarto T., 1993) menyatakan bahwa "di banyak negara memang terjadi kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapitanya, tetapi itu hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakatnya, sedangkan sebagian besar masyarakat miskin kurang memperoleh manfaat apa-apa, bahkan sangat dirugikan". Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang tepat dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan karakteristiknya. Secara umum, suatu keadaan dikatakan miskin jika ditandai dengan kekurangan atau tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Aspek primer adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder adalah lemahnya jaringan sosial, keuangan dan sumber daya informal, seperti malnutrisi, air, perumahan, perawatan kesehatan, kesehatan yang buruk, dan pendidikan yang relatif rendah.

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun analisis sebab, akibat dan solusi untuk gambaran kemiskinan di provinsi Mojokerto pasca reformasi, menggunakan beberapa data dalam analisis. Data tersebut berupa data sekunder berupa data penduduk dan lapangan kerja, pendidikan, perumahan dan kemiskinan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUENAS) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data lain dari BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kabupaten Mojokerto. Data sekunder yang digunakan adalah data time series dengan periode minimal 3 sampai 5 tahun terakhir.

Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Studi Pustaka. Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang mengidentifikasi kondisi umum dan khusus yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan dengan

mempelajari catatan; dokumen; dan bahan-bahan dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik, juga dibuat untuk mengkaji landasan hukum dan teori-teori yang akan melandasi kajian. mengutip atau menyalin dokumen yang relevan sebagai data untuk penelitian ini. Evolusi Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto Secara umum, pada periode 2016-2020, angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto akan terus menurun namun akan meningkat pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto membuahkan hasil yang menggembirakan, namun pandemi Covid-19 yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia telah meningkatkan jumlah penduduk miskin, sehingga upaya penanggulangan kelaparan Penanggulangan kemiskinan perlu lebih digalakkan. Evolusi tingkat kemiskinan diilustrasikan pada gambar di bawah ini.

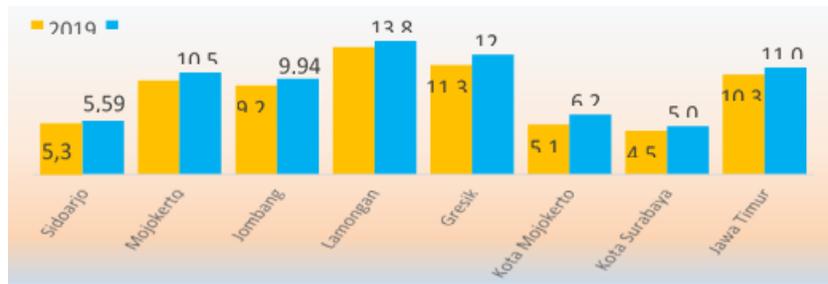


Gambar 1. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020 (%)

Sumber : BPS-RI

Pada tahun 2016, angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto mencapai 115,38 ribu jiwa atau 10,61% dari total jumlah penduduk. Selain itu, tahun-tahun berikutnya terus menurun hingga mencapai 9,75% (108,81 ribu orang) pada tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 118,8 ribu orang (10,57%). Selama periode tersebut, jumlah rumah tangga miskin menurun sebesar 0,04 poin persentase, namun jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 4,94 ribu orang.

Persentase penduduk miskin di 7 kabupaten/kota sekitarnya ditunjukkan pada Gambar 2. Dua kabupaten lebih besar dan lima lebih kecil dari rata-rata provinsi untuk Jawa Timur. Per tahun 2020, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 11,09%, sedangkan kabupaten/kota di sekitar Kabupaten Mojokerto adalah Sidoarjo (5,59%), Jombang (9,94%), Lamongan (13,85%), Gresik (12,40%), Kota Mojokerto (6,24%) dan Kota Surabaya (5,02%). Pada tahun 2020, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur akan mengalami peningkatan angka kemiskinan.



Gambar 2. Perkembangan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kota Sekitar Tahun 2016-2020 (%)

Sumber : BPS-RI

1. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) digunakan sebagai ambang batas untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam kelompok miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah mereka yang pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan. Sebaliknya, seseorang tergolong tidak miskin jika pengeluaran per kapita per bulannya berada di atas garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah harga yang harus dibayar oleh kelompok referensi untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/orang/hari dan kebutuhan non pangan yang tidak esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain. kebutuhan lainnya. Ilustrasi pembentukan garis kemiskinan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2016 hingga 2020, garis kemiskinan meningkat 22,69%, meningkat Rp 75.103 dari Rp 330.940. Kenaikan garis kemiskinan menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Mojokerto untuk memenuhi kebutuhannya semakin meningkat. Dengan kata lain daya beli masyarakat Kabupaten Mojokerto semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, peningkatan garis kemiskinan sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk miskin, yang menunjukkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pangan dan non pangan jauh lebih tinggi dari rata-rata pengeluaran penduduk miskin. Yang sangat miskin dan yang miskin tetap di tempatnya, sementara yang hampir miskin menjadi miskin karena pengeluaran mereka tidak dapat lagi mengimbangi kenaikan garis kemiskinan.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan(P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Pemahaman yang komprehensif tentang kemiskinan sangat penting untuk implementasi kebijakan yang diadopsi secara lebih tepat sasaran dan efektif. Masalah kemiskinan bukan hanya jumlah dan proporsi penduduk miskin, tetapi juga kedalaman kemiskinan (P1) terkait dengan

kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Selain itu, tingkat keparahan kemiskinan juga harus diperhatikan (P2), yaitu tingkat keragaman pengeluaran penduduk miskin. Semakin kecil kedua indikator ini, maka pembuatan kebijakan dalam program anti kemiskinan akan semakin tepat sasaran dan efektif.

Kemiskinan juga dapat dibedakan dengan membandingkan dengan ukuran tertentu atau dengan anggota/kelompok masyarakat lainnya. Pengukuran kemiskinan absolut menggunakan garis kemiskinan atau kondisi tertentu yang mencerminkan kemiskinan. Sedangkan ukuran kemiskinan relatif dibandingkan dengan jumlah kelompok dan dapat digambarkan dengan menggunakan kurva Lorentz dan menggunakan rasio gini untuk menentukan skala kesenjangan.

Strategi pengentasan kemiskinan yang diusulkan oleh Bank Dunia, yang selama satu dekade telah berkembang dari menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mengembangkan kesehatan dan pendidikan, melindungi dan memberdayakan masyarakat miskin. Strategi anti kemiskinan yang dikemukakan oleh Gunnar Adler Karlsson yang dikutip oleh Andre Bayo Ala (1981) meliputi:

- (1) strategi jangka pendek adalah mentransfer sumber daya kepada masyarakat miskin dalam jumlah yang cukup. Perbaikan kemiskinan jangka pendek meliputi penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan perbaikan distribusi;
- (2) Strategi jangka panjang dengan menumbuhkan kegotongroyongan lokal. Perbaikan jangka panjang melalui peningkatan dan pelaksanaan martabat kehidupan pribadi dan sosial.

Strategi penanggulangan kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yang pertama adalah melindungi keluarga dan kelompok masyarakat dalam situasi kemiskinan sementara, dan yang kedua adalah membantu masyarakat miskin kronis dengan memberdayakan dan mencegah munculnya kemiskinan baru. Strategi tersebut kemudian dibagi menjadi tiga program yang ditujukan langsung kepada masyarakat miskin, yaitu:

- 1) memenuhi kebutuhan dasar;
- 2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan
- 3) mengembangkan budaya perusahaan.

Selanjutnya, masyarakat miskin memiliki strategi sendiri untuk mengatasi kemiskinan. Strategi yang ditempuh adalah meminjam dari organisasi informal, menambah jam kerja, memaksa anggota keluarga untuk bekerja, bermigrasi atau menabung. Konsep kebijakan yang digunakan

pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan tradisi dan pendekatan perencanaan yang mendasarinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil analisis penyebab kemiskinan, konsekuensi dan solusi terhadap gambaran kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pasca reformasi, diketahui bahwa keadaan kemiskinan pada tahun 2020 garis kemiskinan berbanding lurus dengan penambahan jumlah penduduk. Penduduk miskin, yang menunjukkan bahwa kenaikan harga permintaan makanan dan bukan makanan jauh lebih tinggi daripada rata-rata pengeluaran penduduk miskin. Yang sangat miskin dan yang miskin tetap di tempatnya, sementara yang hampir miskin menjadi miskin karena pengeluaran mereka tidak dapat lagi mengimbangi kenaikan garis kemiskinan. Dengan demikian, penduduk miskin adalah penduduk yang pengeluaran per kapita per bulannya di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mencapai 118,80 ribu orang (10,57%), meningkat 9,99 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 108,81 ribu orang (9,75%). di Kabupaten Mojokerto menempati peringkat 21 dari 38 kabupaten. Kota Batu tercatat memiliki angka kemiskinan terendah sebesar 3,89%, sedangkan angka tertinggi berada di Kabupaten Sampang (22,78%). Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, pemerintah mengeluarkan undang-undang atau kebijakan yang akan membantu mengurangi kemiskinan. Strategi penanggulangan kemiskinan juga telah diusulkan oleh beberapa aktor seperti Bank Dunia, strategi penanggulangan kemiskinan yang diusulkan oleh Gunnar Adler Karlsson dikutip oleh Andre Bayo Ala (1981), strategi penanggulangan kemiskinan yang diusulkan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa kemiskinan di Indonesia Pasca reformasi sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkelanjutan. Sudah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, namun belum membawa perubahan yang berarti. Strategi pembangunan yang dikembangkan bangsa Indonesia selama ini adalah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang dianggap tinggi ternyata tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat. Sehingga terjadi trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan. Melihat beberapa kekeliruan paradigma penanggulangan kemiskinan, dimana analisis yang seharusnya memunculkan variabel-variabel

yang signifikan. Evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan diantaranya dapat dilakukan terhadap pendekatan perencanaan, model pembangunan yang digunakan dan pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. Badan Pusat Statistik. 2020. Profil Kemiskinan Kabupaten Mojokerto tahun 2020.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto. 2020. Buku Pemetaan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto 2013. Kabupaten Mojokerto : Bappeda
- BPS. 2017. Badan Pusat Statistik. 2017. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016. Jakarta
- BPS.2018. Badan Pusat Statistik. 2018. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017. Jakarta
- BPS. 2019. Badan Pusat Statistik. 2019. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018. Jakarta
- BPS. 2020. Badan Pusat Statistik. 2020. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019. Jakarta
- djpb. kemenkeu. memahami kembali strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia sebagai sumber penerimaan Negara.